

Dari Kesepakatan Washington [1995] ke Kesepakatan London [2025]

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Pada tahun 1989 - dalam kedudukannya selaku penasehat lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional Bank Dunia (*World Bank*, WB) dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*, IMF) yang berkedudukan di Washington D.C, - seorang ekonom terkemuka berkebangsaan Inggris, **John H. Williamson [1937-2021]**, mengusulkan 10 prinsip kebijakan ekonomi yang seyogyanya harus diikuti oleh negara-negara di dunia agar terhindar dari krisis ekonomi. Ke-10 prinsip tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Kesepakatan Washington” atau *The Washington Consensus*. Dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kesepakatan tersebut, sepanjang tahun 1990an, dipelopori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Uni Eropa, satu demi satu negara di dunia menerapkan kebijakan ekonomi yang sejalan, sehingga pada tahun 1995 praktis mayoritas negara di dunia, termasuk negara-negara Eropa Timur, Amerika Latin dan sebagian Asia, sudah menganut Kesepakatan Washington sesuai versinya masing-masing.

Indonesia mengalami krisis multi-dimensi yang diawali dengan krisis moneter pada tahun 1997 yang berbuntut runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan lengsernya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Untuk pemulihan pasca-krisis – dengan supervisi langsung dari IMF dan WB - Indonesia mau tidak mau mengikuti panduan 10 prinsip dari Kesepakatan Washington, sehingga bisa keluar dari krisis walau pun lebih lambat daripada negara-negara lain di Asia. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati (SMI) mendapatkan predikat sebagai menteri keuangan terbaik di dunia versi IMF dan WB, karena secara ketat menjalankan prinsip-prinsip Kesepakatan Washington, terutama dalam hal kebijakan fiskal, prinsip pertama dari kesepakatan tersebut. Sistem ekonomi dunia yang sesuai dengan Kesepakatan Washington disebut juga sebagai sistem ekonomi “*neo-liberal*”, karena di antara 10 prinsip-nya terdapat antara lain liberalisasi perdagangan (ekonomi pasar bebas), liberalisasi penanaman modal asing, liberalisasi sistem keuangan dengan nilai-tukar valuta asing yang kompetitif, privatisasi badan usaha milik negara dan deregulasi yang mengurangi peranan negara sampai se-minimal mungkin.

Dalam prakteknya, Kesepakatan Washington yang mendorong globalisasi ekonomi, banyak mengabaikan konteks sosial di masing-masing negara penganutnya, juga tidak memperhatikan relasi kekuasaan dan hubungan tata-kelola antar kelembagaan. Hal ini mengakibatkan melemahnya kapasitas pemerintahan justru ketika pemerintah yang kuat diperlukan untuk memulihkan krisis ekonomi.

Maraknya kasus korupsi, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan berbagai bencana alam, kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin serta rentannya pranata sosial kemasyarakatan, ditengarai berakar dari penerapan berbagai kebijakan (ekonomi) yang berpedoman pada Kesepakatan Washington yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pembangunan. Pembangunan dijadikan semata-mata masalah teknis perekonomian, mengabaikan aspek-aspek sosial, budaya dan bahkan politik. Walau pun banyak negara telah terbukti berhasil menjadi peyintas dan (relatif) “selamat” dari krisis global yang dahsyat akibat pandemi COVID-19, dampak (negatif) dari penerapan Kesepakatan Washington terhadap keberlangsungan kehidupan dunia masih terus menghantui, khususnya bagi para ekonom dan ahli kebijakan publik.

Pada tahun 2025 yang lalu, yaitu sekitar 30an tahun setelah Kesepakatan Washington, lebih dari 50 orang pemikir ekonomi dan kebijakan publik berkumpul di kampus *London School of Economics*, mencoba merumuskan kesepakatan baru yang dituangkan dalam buku setebal lebih dari 600 halaman dalam format PDF berjudul “*The London Consensus*” [2025], disunting oleh **Tim Besley**, **Irene Bucelli** dan **Andres Velasco**. Buku tersebut di-klaim berisi prinsip-prinsip ekonomi untuk abad ke-21. Tentu saja sebagian merupakan pengembangan (dan koreksi) dari Kesepakatan Washington, sehingga disebut Kesepakatan London atau *The London Consensus*. Di antara perbedaan yang paling mendasar antara kedua kesepakatan itu adalah terkait dengan orientasi liberalisasi pasar yang dikembangkan menjadi sistem ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh menghadapi krisis, mengembangkan dialog dalam menerapkan kebijakan, lebih fokus pada mengatasi kesenjangan, perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup, pemerintahan yang baik dan pengembangan teknologi. Peranan pemerintah yang oleh Kesepakatan Washington dikurangi, dengan Kesepakatan London justru dibuat lebih aktif, disesuaikan dengan konteks sosial-politik di setiap negara. Pengembangan ini dituangkan menjadi 5 (lima) prinsip inti (*core principles*) dari Kesepakatan London.

Dalam konteks Indonesia, menteri keuangan terbaik di dunia versi WB dan IMF, SMI, telah digantikan oleh orang Bogor Purbaya Yudi Sadewa (PYS). PYS sudah memulai berbagai langkahnya dalam bentuk berbagai gebrakan, seolah-olah meng-koreksi kebijakan SMI yang menganut disiplin ketat dalam rangka menjaga kestabilan fiskal dan moneter, yang dianggap PYS malah menghambat pertumbuhan ekonomi. Apakah PYS akan mengikuti prinsip-prinsip Kesepakatan London sebagaimana SMI mengikuti Kesepakatan Washington, sehingga peralihan dari era SMI ke era PYS akan menjadi peralihan dari era Kesepakatan Washington ke era Kesepakatan London di Indonesia? Waktu jugalah yang akan menjawabnya.

Gunung Batu, awal Februari 2026